



OPEN  
GOVERNMENT  
INDONESIA

# Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia Tahun 2017

*Indonesia End of Term Self-Assessment Report of 4th  
National Action Plan 2016-2018*

# Daftar Isi

A. Pendahuluan	1
B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	2
I. Kolaborasi dalam Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	3
II. Kolaborasi dalam Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	4
III. Kampanye Isu Keterbukaan Pemerintah di Level Regional	5
C. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism (IRM) 2016-2017	6
I. Rekomendasi untuk mengikuti panduan OGP dalam pembuatan rencana aksi, pengembangan, dan pemantauan.	6
II. Rekomendasi untuk pengembangan strategi dalam melokalisasi keterbukaan pemerintah di daerah-daerah di Indonesia.	6
III. Rekomendasi terkait melembagakan forum kemitraan melalui keputusan pemerintah.	6
IV. Rekomendasi terkait penyertaan rencana dan prioritas strategis pemerintah dalam rencana aksi nasional OGP.	7
V. Rekomendasi terkait pembuatan pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka.	7
D. Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017	8
I. Pencapaian Tingkat Nasional	9
II. Pencapaian Tingkat Subnasional	12
E. Komitmen Unggulan 2017	19
I. Satu Peta sebagai Bentuk Pemetaan Partisipatif	19
II. Forum Konsultasi Publik	19
III. Keterbukaan Anggaran	19
IV. Panduan Tata Kelola dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	19
V. Keterbukaan Kanal Informasi Gampong (Desa) di kota Banda Aceh	19
VI. Penguatan Tata Kelola Data dan Kanal Pengaduan Publik di Semarang	20
VII. Penguatan Keterlibatan Masyarakat di Kota DKI Jakarta	20
VIII. Open Data di Kota Bandung	20
F. Penutup	21

## A. Pendahuluan

Permasalahan pembangunan di Indonesia sangatlah kompleks sehingga membutuhkan upaya-upaya multidimensional yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Salah satu upaya dan metode yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang terbuka. . Fondasi dan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yang patut untuk dijunjung tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Pemerintah yang terbuka akan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan nasional.

Indonesia telah bergabung di dalam Open Government Partnership sejak tahun 2012 dan telah mengimplementasikan 4 (empat) rencana aksi, termasuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2016-2017 yang merupakan rencana aksi keempat. Selain melibatkan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, terdapat 5 (lima) pemerintah daerah yang terlibat dalam renaksi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Bandung.

Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan dapat menjawab 5 (lima) tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, yakni : (1) praktik korupsi yang sistematis; (2) akses informasi publik yang terbatas; (3) saluran partisipasi publik yang terbatas; (4) penyediaan pelayanan publik yang belum optimal; dan (5) sistem penegakan hukum yang lemah. Rencana Aksi OGI 2016-2017 akan fokus dalam menjawab tantangan pertama, ketiga, dan keempat, dengan (i) mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi; (ii) mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan; dan (iii) mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Merujuk pada nilai-nilai keterbukaan pemerintah, Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 menekankan lima pilar prioritas yaitu: (1) penyusunan grand strategy pemerintah terbuka; (2) peningkatan partisipasi publik; (3) perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik; (4) penguatan keterbukaan informasi publik; serta (5) pembenahan tata kelola data.

Dari kelima prioritas tersebut, terdapat total 50 (lima puluh) komitmen dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 dengan 69 (enam puluh sembilan) indikator capaian, dimana sebanyak 17 (tujuh belas) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah telah terlibat di dalamnya. Perbedaan yang terlihat cukup signifikan antara rencana aksi sebelumnya dengan rencana aksi saat ini adalah tingkat pencapaiannya, dimana Rencana Aksi OGI 2016-2017 mampu mendorong tercapainya 45 (empat puluh lima) indikator capaian dengan perbandingan kenaikan capaian dari Rencana Aksi OGI 2015 sebesar 16,2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencapaian praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia selama 2017 telah meningkat dan diharapkan senantiasa terus mengalami kemajuan.

## B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 diluncurkan pada Desember 2016 oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Tim penyusun terdiri atas beberapa unsur, baik dari K/L seperti Kementerian PPN/ Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, maupun perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Rencana aksi ini merupakan Renaksi OGI keempat sejak tahun 2012. Proses penyusunan renaksi OGI tahun ini secara aktif melibatkan publik di tiap tahap penyusunannya. Bahkan bukan hanya menerapkan metode konvensional melalui diskusi/tatap muka, proses pelibatan publik di tahun ini juga dilakukan melalui sarana online.

Secara garis besar pada periode 2016-2017 ini, renaksi dibuat dalam lima tahapan yaitu: (1) penjaringan aspirasi; (2) lokakarya penyusunan renaksi; (3) penilaian daerah; (4) penajaman; dan (5) finalisasi. Keseluruhan proses ini menerapkan prinsip partisipasi dan ko-kreasi. Berikut penggambaran proses penyusunan Renaksi OGI 2016-2017.

**Gambar 1: Proses Penyusunan Renaksi OGI 2016-2017**



## **I. Kolaborasi dalam Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017**

### **a. Tahap Penjaringan Aspirasi**

Tahap penjaringan aspirasi menggunakan metode survei online melalui ragam aset digital yang dimiliki seperti situs, Facebook dan Twitter. Survei online ditujukan untuk menjaring pendapat publik mengenai tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di 7 (tujuh) sektor pemerintahan yang sudah disepakati oleh tim penyusun, yaitu : (i) pelayanan publik; (ii) penegakan hukum; (iii) transparansi anggaran; (iv) lingkungan hidup dan sumber daya alam; (v) keterbukaan parlemen; (vi) pembangunan desa; dan (vii) tata kelola data. Survei yang dilaksanakan selama dua minggu tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 316 responden dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat terjaring dengan baik. Hasil dari penjaringan aspirasi publik ini kemudian dirumuskan menjadi isu-isu prioritas dalam renaksi.

### **b. Tahap Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi**

Tahap lokakarya penyusunan renaksi mempertemukan K/L yang potensial untuk terlibat dalam Renaksi OGI dengan unsur-unsur masyarakat sipil. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas 9 (sembilan) isu untuk Government Self-Assessment Report 2016, tantangan kunci, serta solusi alternatif di 7 (tujuh) sektor yang sudah disepakati sebelumnya.

### **c. Tahap Penilaian Daerah**

Terkait konteks daerah, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil mengunjungi beberapa kandidat pemerintah daerah. Pada tahapan pertama, Seknas OGI bersama masyarakat sipil menilai kesiapan beberapa daerah melalui desk review. Setelah itu, kedua pihak bertemu untuk mempertajam daftar daerah potensial untuk dinilai secara langsung. Dalam kunjungan daerah, Seknas OGI dan masyarakat sipil memvalidasi temuan dan kesiapan pemerintah daerah melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan aparatur daerah setempat. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian daerah adalah : (1) komitmen kepala daerah; (2) keberadaan local champions; (3) kesiapan kanal dan regulasi keterbukaan; dan (4) ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil. Berdasarkan penilaian inilah maka Seknas OGI bersama koalisi masyarakat sipil memutuskan bahwa DKI Jakarta, Bojonegoro, Semarang, Bandung dan Banda Aceh adalah daerah yang tepat untuk terlibat dalam Renaksi 2016-2017.

### **d. Tahap Penajaman Renaksi**

Pada tahap penajaman renaksi, dilaksanakan dua metode, diskusi bilateral dan multilateral, metode ini dipilih untuk memastikan setiap komitmen yang menjadi rencana aksi adalah sesuatu yang fundamental bagi tercapainya prioritas nasional. Selain itu, diskusi penajaman juga berguna untuk memastikan setiap rencana aksi masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan/atau teranggarkan oleh instansi penanggung jawab terkait.

### e. Tahap Finalisasi Renaksi

Pada tahap finalisasi, Seknas OGI mempraktikkan ko-kreasi dengan pelibatan seluruh koalisi masyarakat sipil, K/L serta pemda yang terlibat dalam komitmen renaksi untuk duduk bersama dan menyepakati bersama poin-poin renaksi dalam bentuk dokumen resmi. Pada fase inilah Seknas OGI berhasil menetapkan 50 komitmen dari 17 K/L dan pemda untuk periode 2016-2017.

## II. Kolaborasi dalam Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Setidaknya terdapat 3 (tiga) praktik partisipasi dan ko-kreasi dalam siklus Open Government Partnership yaitu : (1) diseminasi informasi; (2) pelibatan publik melalui forum dialog; dan (3) kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama. Dalam aspek diseminasi informasi, terdapat website resmi yang mudah diakses, menyimpan seluruh data terkait kinerja Seknas OGI seperti rencana aksi tiap dua tahunan, laporan pelaksanaan rencana aksi tahunan – *Government Self-Assessment Report (GSAR)*, laporan evaluator independen terhadap pencapaian rencana aksi – *Independent Reporting Mechanism (IRM)*, dan data-data terkait implementasi keterbukaan.

Kemudian dalam aspek pelibatan publik melalui forum dialog dan ko-kreasi, telah dibuka ruang praktik pelibatan publik, termasuk masyarakat sipil, di tiap tahapan penyusunan Renaksi. Telah disediakan kolom komentar di website dan jejaring sosial media OGI yang selalu terbuka dengan berbagai input/masukan dari publik. Selanjutnya, dalam aspek kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama, Seknas OGI juga memberikan ruang partisipasi yang sama besarnya bagi unsur publik dan pemerintah dalam seluruh tahapan Renaksi. Baik pada tahapan penyusunan hingga implementasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Rencana Aksi OGI harus dapat diawasi dan dikendalikan dengan tepat agar target yang ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Untuk itu, sejak tahun 2017, Seknas OGI melaksanakan praktik pemantauan bersama dan evaluasi bersama renaksi dalam bentuk diskusi. Pada setiap triwulannya, Seknas OGI mengajak perwakilan masyarakat sipil untuk turut memberikan penilaian terhadap data dukung yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang terlibat dalam rencana aksi. Diskusi dilaksanakan secara terbuka dengan fokus membahas target capaian dan bukti dukung yang dilampirkan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait. Melalui forum ini, pada akhirnya akan disepakati penilaian kuantitatif (range:0-100%) terhadap klaim capaian yang diberikan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam sistem pemantauan nasional.

### III. Kampanye Isu Keterbukaan Pemerintah di Level Regional

Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa Open Government Partnership (OGP) bersama dengan 7 (tujuh) negara lain, berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi dan teknologi. Sejak bergabungnya Indonesia dalam kemitraan multilateral ini, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya sebagai *Co-Chair* OGP pada periode 2013-2014 dan terutama di regional Asia Pasifik dengan kesuksesan pemerintah Indonesia menyelenggarakan Asia Pacific Leaders' Forum (APLF) pada tahun 2017.

APLF 2017 dengan mengusung tema *Open Government for Inclusive Development* dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 650 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik dan 29 negara sahabat lainnya di Asia Pasifik dan sekitarnya.

APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu : (1) *Opening Plenary - Setting the Stage : Open Government for Inclusive Development*; (2) *Ministerial Roundtable*; (3) *Subnational Roundtable*; (4) *Panel on The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government*; (5) *Session 1: Achieving Poverty Reduction and Economic Development through Open Government*; (6) *Session 2: Building Trust and Public Integrity*; (7) *Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development*; (8) *Session 4: The Role of Open Government in Environmental Sustainability*; dan (9) *Closing Plenary*. Pembahasan dilakukan secara mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practices keterbukaan pemerintah.

## C. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism (IRM) 2016-2017

Menindaklanjuti rekomendasi dari *Independent Reporting Mechanism (IRM)* sebagai tim evaluator independen OGP pada *IRM Progress Report* tahun 2016-2017, terdapat beberapa rekomendasi dan masukan untuk rencana aksi OGI kedepannya yang terdiri dari :

### I. Rekomendasi untuk mengikuti panduan OGP dalam pembuatan rencana aksi, pengembangan, dan pemantauan.

Pemerintah terus melakukan perbaikan dan peningkatan performa dalam proses penyusunan rencana aksi kedepannya khususnya untuk Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020. Pada tahun 2017, Seknas OGI mulai lebih intens melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan seluruh mitra OGI sesuai dengan panduan dari OGP.

### II. Rekomendasi terkait pengembangan strategi untuk melokalisasi keterbukaan pemerintah di daerah-daerah di Indonesia.

Dalam Rencana Aksi OGI 2016-2017, Seknas OGI telah menjangkau 5 (lima) daerah dengan tujuan mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah. Kelima daerah tersebut adalah Kota DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kabupaten Bojonegoro. Ke depannya akan diperluas cakupan penerapan keterbukaan pemerintah ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk berbagai kegiatan.

### III. Rekomendasi terkait melembagakan forum kemitraan melalui keputusan pemerintah.

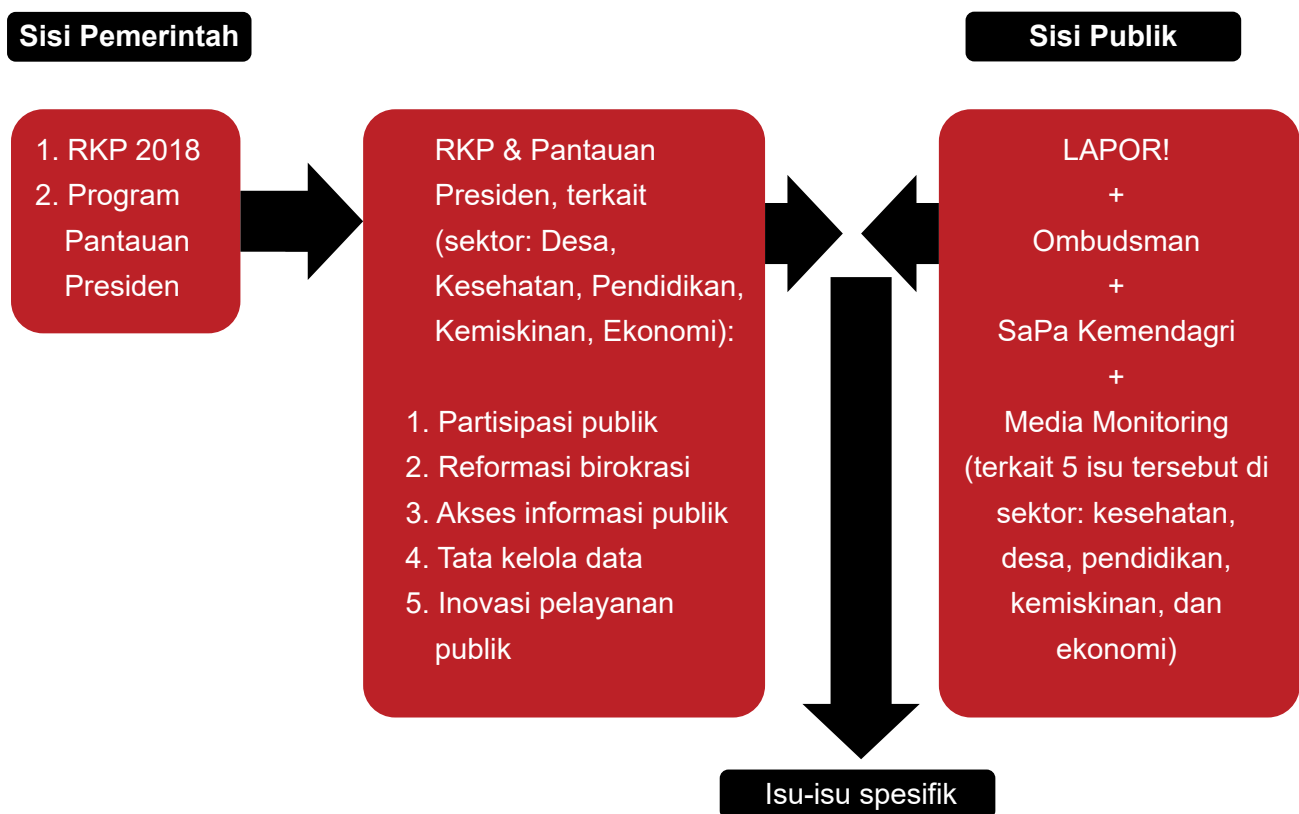
Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tentang Tim Pelaksana Open Government Indonesia 2017-2018 untuk mendukung keberlanjutan dari kolaborasi yang dijunjung tinggi oleh inisiatif keterbukaan pemerintah. Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan upaya pemerintah dalam mendorong prinsip kolaborasi dan partisipasi ke dalam proses pelayanan publik. Sementara, pada level pemerintah daerah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan-peraturan ini merupakan kerangka hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam mendorong keterbukaan pemerintah kedepannya.



#### IV. Rekomendasi terkait penyertaan rencana dan prioritas pemerintah strategis dalam rencana aksi nasional OGP.

Memasuki siklus Rencana Aksi 2018-2019, Seknas OGI memulai pembahasan dengan menyusun konsep perumusan rencana aksi pada siklus tersebut. Dari hasil diskusi dan pembelajaran yang mengacu dari berbagai sumber seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMN, Pantauan Presiden, kanal-kanal pengaduan masyarakat, maka ditetapkan konsep penyusunan Rencana Aksi 2018-2019 yang mencoba mengkombinasikan agenda prioritas pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Gambar 2 : Konsep penyertaan prioritas pemerintah dengan Renaksi OGI



#### V. Rekomendasi terkait pembuatan pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi ini, kami telah merencanakan adanya pendaftaran kepemilikan manfaat online secara terbuka dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah tahun 2018-2020. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan inisiatif beneficial ownership transparency sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap Paris Declaration yang disepakati dalam Open Government Partnership Global Summit tahun 2016. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka akan diakomodir dalam Rencana Aksi OGI selanjutnya.

## D. Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017

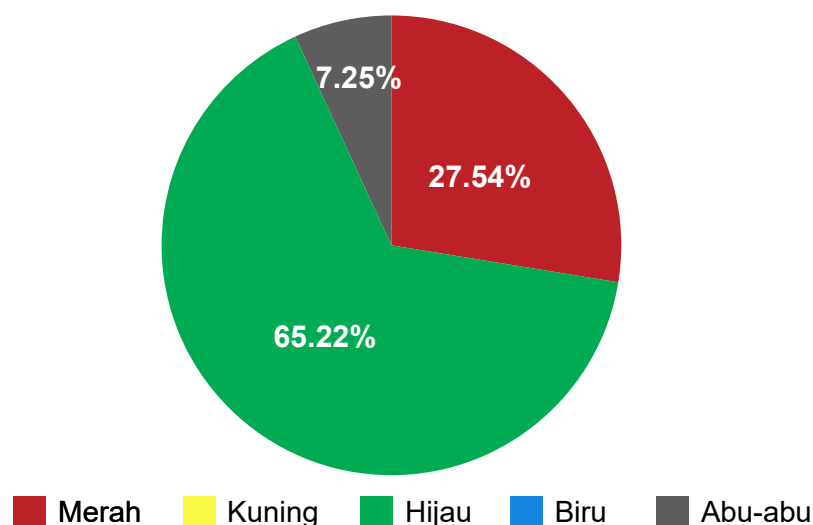
Dalam kurun waktu implementasi yang kurang dari dua tahun, secara umum tingkat capaian renaksi pada paruh putaran keempat (4th NAP cycle) mengalami peningkatan, walaupun terjadi sedikit penurunan pada jumlah kementerian/lembaga yang terlibat seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1 : Perbandingan Tingkat Ketercapaian Renaksi OGI Periode 2012 - 2016**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah KLD	14	13	24	21	17	17
Komitmen	38	21	64	52	50	50
Capaian 100%	76.6	85.7	54.7	48	70	65.22

Dari total 69 indikator capaian oleh 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dirangkum dan dijabarkan dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017, sebanyak 45 indikator capaian (65.22%) berhasil mencapai target akhir yaitu 100%, 19 indikator capaian (27.54%) sudah mulai dijalankan namun belum mencapai target akhir capaian, dan sebanyak 5 indikator capaian (7.25%) yang ditargetkan untuk diselesaikan di tahun 2017 dikategorikan sebagai tidak memiliki target akhir capaian. Adapun gambaran atas capaian renaksi 2017 dapat dilihat pada diagram berikut.

**Gambar 1 : Capaian Renaksi OGI 2017**



T17-B12 December 2017

■ 19 • 19 Target akhir tidak tercapai

■ 45 • 45 Target akhir tercapai

■ 5 • 5 Tidak ada target

TOTAL 69

## I. Pencapaian Tingkat Nasional

Terdapat total 21 komitmen dan 21 target rencana aksi 2017 di tingkat nasional. Dari rencana aksi ini, sebanyak 16 target telah mencapai target akhir, sedangkan 5 target belum tercapai. Tabel dibawah ini memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen rencana aksi 2017 di tingkat nasional tersebut.

**Tabel 2 : Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2017 di Tingkat Nasional**

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
<b>Tercapai (16 Target)</b>		
<i>Grand Strategy</i> Pemerintah Terbuka	Tersusunnya Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Peningkatan Partisipasi Publik	Tersusunnya himbauan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan konsultasi publik secara rutin di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan sebagai realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Tersusunnya panduan tata kelola yang baik (manual governance) dan pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai upaya mewujudkan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs yang lebih partisipatif	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS

	Peningkatan partisipasi publik di dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial	Badan Informasi Geospasial (BIG)
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Meningkatkan keterhubungan lebih banyak BUMN ke LAPOR!	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Desa (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan) yang terbuka dan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan desa	Kementerian Dalam Negeri
	Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
	Peningkatan kredibilitas Ombudsman RI sebagai otoritas nasional pemantau kualitas pelayanan publik	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
	Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Agama	Kementerian Agama
	Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

	Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran	Kementerian Keuangan

**Tidak Tercapai (5 Target)**

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
---	---	---

	Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via LAPOR! menjadi 1 Juta aduan untuk 2016	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tata Kelola Data	Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah	Kantor Staf Presiden

## II. Pencapaian Tingkat Subnasional

Terdapat total 25 komitmen dan 48 target renaksi di tingkat daerah dengan rincian 34 target tercapai dan 14 target lainnya tidak tercapai. Secara garis besar, komitmen Renaksi 2017 di level daerah tercapai untuk keempat pilar strategis: (1) penguatan keterbukaan informasi publik, (2) peningkatan partisipasi publik, (3) perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan pelayanan publik, (4) tata kelola data. Tabel berikut memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen Renaksi 2016 di tingkat sub-nasional (pemerintah daerah).

**Tabel 3 : Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2017 di Tingkat Daerah**

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
<b>Tercapai (34 Target)</b>		
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya 1,500 berkas data di portal data Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung

	Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;	Pemerintah Kota Semarang
	Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website semarangkota.go.id. terupdate	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitasi kedewanan	Pemerintah Kota Semarang
	Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota Administrasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih	Pemerintah Kota Banda Aceh
	Terpublikasikannya perencanaan pembangunan dan anggaran daerah berbasis keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terpublikasikannya rincian APBD SKPD pada web PPID SKPD berbasis keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terimplementasikannya aplikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

	Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Portal Jakarta.go.id dan semua portal turunannya, terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai One-Stop Service Portal	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website sub- domain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)	Pemerintah Kota Banda Aceh
Peningkatan Partisipasi Publik	Pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN	Pemerintah Kota Bandung
	Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017	Pemerintah Kota Semarang
	Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi	Pemerintah Kota Semarang



	Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)	Pemerintah Kota Semarang
	Terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk Layanan Informasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Presentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)	Pemerintah Kota Banda Aceh
Penguatan Tata Kelola Data	Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola e-purchasing (e-catalogue);	Pemerintah Kota Bandung
	Integrasi dengan sistem e-budgeting	Pemerintah Kota Bandung
	Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang	Pemerintah Kota Semarang
	Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang	Pemerintah Kota Semarang
	Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang

	Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu Data Nasional	Pemerintah Kota Semarang
	Terverifikasinya data hasil input kader dasa wisma PKK sebagai data tunggal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data dasa wisma	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terinputkannya data bojonegoro pada portal data nasional data.go.id	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik	Pemerintah Kota Bandung
	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR!	Pemerintah Kota Bandung
	Presentase efektivitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya tur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

**Tidak Tercapai (14 Target)**

Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda	Pemerintah Kota Semarang
--	--	--------------------------

	Tersedianya strategi dan rencana kerja komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penguatan Tata Kelola Data	Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan termuktahirkan berdasarkan SOTK baru	Pemerintah Kota Bandung
	Penambahan tur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat	Pemerintah Kota Bandung
	Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%	Pemerintah Kota Bandung
	Terpublikasikannya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung <a href="http://ppid.bandung.go.id">http://ppid.bandung.go.id</a> ;	Pemerintah Kota Bandung

	<p>Terpublikasikannya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN  <a href="http://sabilulungan.bandung.go.id">http://sabilulungan.bandung.go.id</a></p>	Pemerintah Kota Bandung
	<p>Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang</p>	Pemerintah Kota Semarang
	<p>Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD</p>	Pemerintah Kota Semarang
	<p>Terpublikasikannya APBDes, Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%) , webdes (70%); terpublikasikannya aset desa melalui baliho (10%)</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	<p>Terimplementasikannya pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga masyarakat</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	<p>Terlaksanakannya maklumat pelayanan publik di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

## E. Komitmen Unggulan 2017

Penentuan komitmen unggulan adalah berdasarkan pencapaian target sebesar 100% dan memiliki dampak yang transformatif dengan memuat nilai-nilai keterbukaan pemerintah. Komitmen unggulan tersebut diambil dari beberapa komitmen level nasional dan komitmen level daerah, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

### I. Satu Peta sebagai Bentuk Pemetaan Partisipatif

Tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam tata kelola perbaikan geospasial. Indikator capaiannya ditentukan dengan ditetapkannya standar acuan peran masyarakat dalam kebijakan satu peta. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan mengakses kebijakan satu peta.

### II. Forum Konsultasi Publik

Penyusunan himbauan dan panduan bagi instansi publik dalam melakukan konsultasi publik merupakan tujuan dari komitmen ini. Output yang telah dihasilkan dari komitmen ini adalah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2017.

### III. Keterbukaan Anggaran

Transparansi keterbukaan informasi anggaran menjadi tujuan dari komitmen ini. Akses terhadap portal data melalui website [data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id) dan fitur peta data serta data query menjadi hasil yang ingin dicapai lewat komitmen keterbukaan anggaran ini. Dampak yang signifikan dari berhasilnya implementasi komitmen ini adalah masyarakat dapat memantau alokasi anggaran dengan mudah dan informatif.

### IV. Panduan Tata Kelola dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dengan adanya panduan ini, Sekretariat SDGs dapat membangun platform komunikasi digital yang memungkinkan publik berkontribusi secara aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan rencana aksi SDGs.

### V. Keterbukaan Kanal Informasi Gampong (Desa) di Kota Banda Aceh

Desa menjadi salah satu bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Untuk memperkuat kinerja pemerintah desa, pada rencana aksi keterbukaan pemerintah 2016-2017, Kota Banda Aceh berkomitmen untuk membuka informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat diantaranya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih. Selain itu, untuk memperkuat komitmen tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh juga menetapkan Perwali terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/ Kelurahan.

## **VI. Penguatan Tata Kelola Data dan Kanal Pengaduan Publik di Kota Semarang**

Salah satu komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mendorong keterbukaan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan data. Data tersebut diintegrasikan juga dengan pelayanan informasi publik yang inovatif, dan juga dengan peningkatan mekanisme pelaporan masyarakat Semarang. Pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan sangat progresif di dalam memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat daerah di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk Pusat Informasi Publik yang mengintegrasikan pelayanan data dan informasi, dengan pelayanan pengaduan masyarakat, serta juga berfungsi sebagai pusat kegiatan publik.

## **VII. Penguatan Keterlibatan Masyarakat di Kota DKI Jakarta**

Komitmen DKI Jakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan salah satunya dengan memperkuat keterlibatan masyarakat. Upaya penguatan tersebut terdiri dari penguatan pemanfaatan informasi publik, partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penguatan saluran pengaduan pelayanan publik. Komitmen unggulan keterbukaan pemerintah di DKI Jakarta terkait dengan partisipasi publik adalah terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!). Selain membangun platform pengaduan yang terintegrasi, DKI Jakarta juga mempublikasikan Pergub Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Pemprov DKI untuk memperkuat portal pengaduan tersebut.

## **VIII. Open Data di Kota Bandung**

Salah satu bukti komitmen utama Bandung terhadap pemerintahan terbuka adalah pada usahanya untuk mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam memperkuat transparansi pemerintah-nya. Untuk membenahi kuantitas dan kualitas data pemerintah, Kota Bandung berkomitmen meningkatkan jumlah data yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

## F. Penutup

Tahun 2017 merupakan tahun yang cukup penuh tantangan dalam mengimplementasikan Renaksi periode 2016-2017. Selain dikarenakan jumlah komitmen yang masih cukup banyak kuantitasnya, namun cakupan komitmen juga telah meluas, bukan hanya berfokus pada pemerintah pusat namun bekerjasama pada lima pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman tersebut, terdapat beberapa pembelajaran yang didapatkan.

Empat pembelajaran yang didapatkan dari implementasi Renaksi 2016-2017 di antara lain:

- a. Penyusunan dan implementasi renaksi OGI masih sangat bergantung pada figur-figur yang menempati posisi tertentu dalam pemerintahan. Ketika individu tersebut tidak menjabat lagi, sangat sulit untuk mempertahankan komitmen maupun melakukan transfer ilmu pada figur selanjutnya. Hal ini disebabkan karena belum tumbuh rasa kepemilikan yang mendalam dari K/L terhadap Renaksi OGI maupun gerakan Open Government itu sendiri.
- b. Proses pengendalian atas renaksi, melalui pemantauan dan evaluasi belum berjalan dengan maksimal. Agenda pemantauan dan evaluasi perlu menjadi salah satu prioritas agar komitmen-komitmen dalam Renaksi dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.
- c. Rencana Aksi Open Government Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Renaksi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Substansi yang didorong melalui beberapa Renaksi tersebut berpotensi tumpang tindih dan tidak efektif.
- d. Salah satu aspek terpenting dalam OGI adalah ko-kreasi, dimana Civil Society Organizations (CSOs) menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan Renaksi pemerintah. Pada fase implementasi Renaksi, yang bertanggung jawab menjalankan komitmen sepenuhnya dilaksanakan K/L. Ke depan keterlibatan dan tanggungjawab CSO dalam proses pengawalan renaksi perlu diperkuat dan diperluas.

Dari empat pembelajaran yang telah disebutkan, dapat ditarik empat rekomendasi yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kepemilikan Renaksi Open Government dan gerakan keterbukaan pada pemerintah, perlu adanya pelembagaan komitmen keterbukaan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Penguatan proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renaksi.
- c. Konsolidasi substansi dalam Renaksi OGI dengan rencana aksi atau kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
- d. Perluasan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam Renaksi, tidak hanya dalam proses penyusunan tetapi dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

